

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



---

## **BPK Menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan ditujukan untuk **memberikan opini** atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019, dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada hari Senin 15 Juni 2020, telah dilaksanakan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2019 oleh BPK RI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, BPK RI menyerahkan LHP secara daring (*online*) melalui *video conference*. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Anggota VI BPK RI, Bapak Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA kepada Ketua DPRD dan Gubernur Kalimantan Tengah atau yang mewakilinya. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Dori Santosa sebagai Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI (Tortama VI), Bapak Ade Iwan Ruswana sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa pejabat struktural dan Fungsional Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.

LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari tiga laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2019. Pencapaian opini WTP ini adalah yang keenam kalinya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Namun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya:

1. Kesalahan berulang atas pengklasifikasian beberapa anggaran belanja daerah yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya dan/atau output yang dihasilkan;

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2. Pengendalian atas pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai;
3. Realisasi belanja yang bersumber dari sisa dana BOS tahun sebelumnya belum melalui mekanisme pengesahan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga belum tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2019;
4. Pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya memadai;
5. Beberapa paket pekerjaan tidak sesuai kontrak, baik kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Selain itu, hal penting lainnya yang perlu mendapatkan perhatian yaitu perlunya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada bidang Akuntansi dan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pola mutasi pegawai yang tidak memperhatikan ketersediaan SDM di bidang akuntansi keuangan daerah, baik kecukupan jumlah, kualitas, dan proses regenerasi, berpotensi mengancam kesinambungan atas kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencatatan, pelaporan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan secara memadai.

Satu hal yang harus digarisbawahi adalah pencapaian Opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" yang sudah dipertahankan enam kali berturut-turut akan sia-sia jika tidak diikuti dengan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, agar sejalan dengan salah satu cita-cita bangsa ini yang harus kita wujudkan yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

---

*Informasi lebih lanjut:*

*Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah*

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id